

Efektivitas Program Petani Mandiri (PPM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Petani di Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro

Dendi Armanto

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
dendi.18039@mhs.unesa.ac.id

Badrudin Kurniawan

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Badrudinkurniawan@unesa.ac.id

Abstrak

Permasalahan yang dihadapi pada sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro adalah kerugian akibat gagal panen yang disebabkan musim maupun hama serta sulitnya mencari pupuk dengan harga murah. Dengan adanya Program Petani Mandiri (PPM) diharapkan dapat membantu petani dalam mengatasi permasalahan tersebut. Tetapi banyak masyarakat desa Beji yang belum merasakan manfaat dari PPM. Dari permasalahan tersebut peneliti ingin meneliti tentang Efektivitas program PPM dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Penelitian menggunakan model deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan teori efektivitas program dari enam dimensi menurut Sawir & Hafid yaitu *formulation of purpose, activity of description, evaluation, organizational actors characteristics, worker characteristics, management policies and practice*. Berdasarkan Hasil penelitian Efektivitas Program Petani Mandiri (PPM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Petani di Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan efektif untuk mereka yang mendapatkan Kartu petani mandiri karena manfaat program sangat membantu mengurangi beban keluarga petani dalam hal pembelian pupuk dan biaya anak sekolah. Berdasarkan indikator teori efektifitas program dari Sawir dan hafid. Namun, terdapat indikator yang dinilai kurang efektif dikarenakan kurangnya pegawai pada Bidang SDM dan pembiayaan sehingga mereka tidak mengetahui secara langsung keluhan dan masukan petani setiap desa di Kabupaten Bojonegoro. Dengan terjun langsung ke lapangan maka Dinas Pertanian akan meminimalisir seperti kasus Di desa Beji yaitu terdapat petani satu RT yang belum mendapatkan akses manfaat Program petani mandiri. Dari hasil penelitian peneliti mengharapkan peningkatan koordinasi antar semua pihak yang terkait dengan program PPM agar Tujuan yang diharapkan segera tercapai.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Program Petani Mandiri (PPM), Kesejahteraan Keluarga Petani

Abstract

The problems faced in the agricultural sector in Bojonegoro Regency are losses due to crop failure caused by seasons and pests and the difficulty of finding cheap fertilizers. The Independent Farmer Program (PPM) is expected to help farmers overcome these problems. However, many Beji villagers have not yet benefited from PPM. From these problems, researchers want to examine the effectiveness of the PPM program in improving the welfare of farmer families. This research uses a descriptive model with a qualitative approach. This study uses the theory of program effectiveness from six dimensions according to Sawir & Hafid, namely formulation of purpose, the activity of description, evaluation, organizational actors characteristics, worker characteristics, management policies, and practice. in Beji Village, Kedewan District, Bojonegoro Regency, it can be said to be effective for those who get an independent farmer card because the benefits of the program help reduce the burden on farming families in terms of purchasing fertilizer and school fees for children. Based on the indicators of the theory of program effectiveness from Sawir and Hafid. However, some indicators are considered less effective due to the lack of employees in the HR and financing sector so they do not know the complaints and inputs of farmers in each village in Bojonegoro Regency directly. By going directly to the field, the Department of Agriculture will minimize the case, as in Beji village, where there are farmers in one RT who have not had access to the benefits of the independent farmer program. From the results of the research, the researcher hopes to increase coordination between all parties related to the PPM program so that the expected goals are immediately achieved.

Keywords: Program Effectiveness, Independent Farmer Program (PPM), Farmer Family Welfare

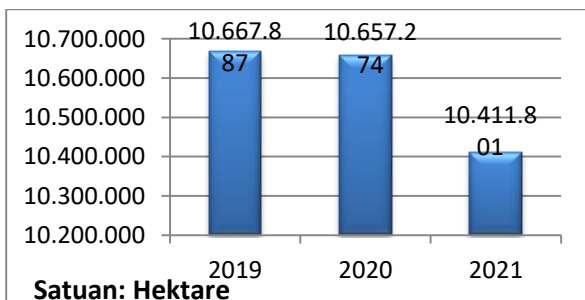
PENDAHULUAN

Sektor Pertanian Merupakan salah satu sektor vital di dunia. Dilihat dari fakta yang ada menunjukkan sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar pada pencapaian tujuan Program Sustainable Development Goals (SDG's) yang nomor 2 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi dan gizi (Arief Suyoto & Susilo Adib, 2019). Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan perhatian khusus pada pembangunan sektor pertanian. Sektor pertanian sebagai salah satu sektor ekonomi termasuk sektor yang sangat potensial karena memberikan sumbangan terhadap pembangunan ekonomi nasional, dari segi pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja di Indonesia (Hayati mimi, Elfiana, Martina, 2017). Salah satu alasan pemerintah dalam hal pembangunan pada sektor pertanian adalah Negara Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian (Suratha, 2017). Pembangunan pada sektor pertanian didukung oleh potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah sehingga pemerintah diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia melalui pembangunan pada sektor pertanian.

Sektor pertanian memiliki potensi besar yang didukung luas lahan panen, jumlah penduduk dan negara Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis yang cocok dimanfaatkan untuk usaha pertanian (Nurhidayat, Sundari, Rudiyanto, 2022). Berdasarkan data BPS luas lahan panen di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 10,41 juta hektare dan pada setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2019 luas lahan panen di Indonesia sebesar 10,67 juta hektare dan pada tahun 2020 luas lahan panen di Indonesia sebesar 10,66 juta hektare

Grafik 1.1

Luas Lahan Panen di Indonesia tahun 2019-2021



Sumber : Badan Pusat Statistika, 2022

Dari data grafik diatas dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan luas lahan panen sekitar 0,25 persen. Dengan menurunnya luas lahan panen juga berpengaruh pada jumlah produksi padi yang semakin

menurun. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2019 produksi padi di Indonesia sebanyak 54,60 ton tetapi pada tahun 2020 menurunnya jumlah luas lahan panen tidak mempengaruhi jumlah produksi padi di Indonesia yang menyentuh 54,65 ton tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan dengan total produksi padi di Indonesia sebanyak 54,41 ton. Penurunan luas lahan panen yang berpengaruh pada jumlah produksi dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta kemarau yang berkepanjangan juga akan berpengaruh pada luas lahan panen di Indonesia. Luas lahan berpengaruh signifikan terhadap indeks kesejahteraan petani (NTP) Jika Luas lahan dan hasil produksi yang semakin menurun juga akan mempengaruhi kesejahteraan petani. Dengan permasalahan tersebut maka harga gabah juga ikut menurun (Wahed, 2015)

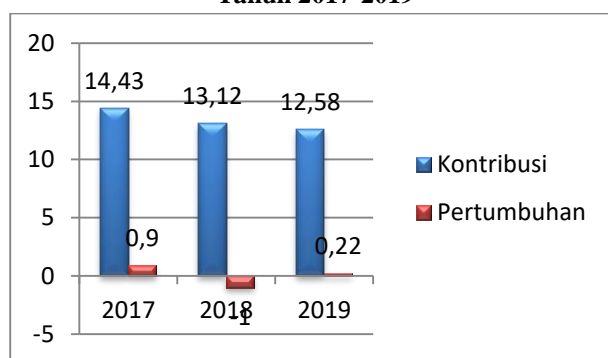
Permasalahan lainnya yang dihadapi petani saat ini adalah posisi tawar yang cenderung masih lemah. Selama ini aktivitas petani masih fokus pada kegiatan produksi (*on farm*) dan belum sepenuhnya terlibat pada kegiatan agribisnis. Petani memproduksi dengan lahan terbatas tanpa dukungan pengetahuan dan informasi yang cukup memadai sehingga hasil produksi tidak maksimal (Dinar Wahyuni, 2017). Terdapat permasalahan pertanian lainnya yang telah terjadi sejak lama yaitu perubahan iklim yang ekstrim. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi disebabkan oleh anomali cuaca yang menyebabkan perkembangan hama dan penyakit yang dapat mengganggu hasil panen bahkan menyebabkan gagal panen (Nusantara, 2021).

Kejadian iklim ekstrim akan menyebabkan beberapa hal, diantaranya: (a) kegagalan panen dan tanam, yang berakibat pada penurunan produktivitas dan produksi; (b) Kerusakan sumber lahan pertanian; (c) peningkatan intensitas banjir/kekeringan; (d) peningkatan kelembaban dan peningkatan organisme pengganggu tanaman (Nuraisah & Budi Kusumo, 2019).

Terkait permasalahan tersebut pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian membuat sebuah kebijakan atau program untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia yaitu dengan menerbitkan Program Kartu Tani. Namun kenyataannya petani yang telah menerima kartu tani dan petani yang belum menerima tidak ada perbedaan pada kenaikan jumlah produksi (Rahayu Wulandari, 2021). Program lain yang dikembangkan Kementerian Pertanian dalam menanggulangi permasalahan menurunnya produksi padi dan kesejahteraan petani menurun adalah dengan korporasi petani, perluasan area tanam baru, komando strategi penggilingan padi, serta food estate.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah lumbung pangan dan energi serta sentra penghasil padi tertinggi ke 3 di Provinsi Jawa Timur dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro mencapai 39% Dari total penduduk di Kabupaten Bojonegoro (beritajatim, 2020). Mayoritas masyarakat Bojonegoro yang bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu sektor perekonomian non migas sangat bertumpu pada sektor pertanian. Hal ini dibuktikan dengan adanya kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada tahun 2017-2019.

Grafik 1.2
Kontribusi dan Pertumbuhan Pertanian di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017-2019



Sumber: Badan Pusat Statistika Bojonegoro, 2020

Kontribusi Pertanian terhadap PDRB yang cenderung menurun pada tahun 2017-2019 dapat mengindikasikan terjadi permasalahan cukup berarti pada sektor pertanian. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan pembangunan di sektor pertanian. Dikutip dari cybex pertanian, Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 Kabupaten Bojonegoro dan Rencana Strategis Dinas Petanian tahun 2018-2023 Kabupaten Bojonegoro menempatkan sektor pertanian masih merupakan prioritas yang perlu ditingkatkan salah satunya melalui program petani mandiri. Pada RPJMD tahun 2018-2023 untuk mewujudkan misi pemerintah kabupaten bojonegoro yaitu meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis ekonomi lokal dengan sasaran pada sektor pertanian adalah naiknya indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai tukar petani merupakan indikator kesejahteraan petani. Dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani, instrumen yang digunakan salah satunya NTP. Peningkatan NTP mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan

petani, begitu juga sebaliknya (Keumala & Zamzami Zainudin, 2018).

Tujuan utama dari kebijakan pertanian adalah untuk menjaga produktivitas pertanian melalui pencapaian keuntungan ekonomi yang selaras dengan pengurangan kemiskinan, sebagai tanggapan terhadap kebutuhan sosial penduduk pedesaan (Ikhsani et al, 2020). Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan yang mayoritas terjadi di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian dapat diatasi dengan meningkatkan pertumbuhan *pro poor*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang memihak kepada rakyat miskin (Ravallion & datt, 2002). Tujuan dari kebijakan tersebut akan mampu terwujud apabila mampu diterjemahkan menjadi langkah konkrit serta dapat dilaksanakan secara konsisten di lapangan (Rose et al, 2019).

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian dengan merumuskan salah satu kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Salah satu program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu Program Petani Mandiri (PPM). Program tersebut telah resmi dijalankan pada tahun 2019. Program Petani Mandiri adalah hibah berupa modal yang berwujud barang kepada petani untuk memberikan kesejahteraan dan kemandirian petani, sedangkan Kartu Petani Mandiri (KPM) adalah kartu yang diberikan kepada keluarga petani sesuai dengan kriteria Perundang-undangan yang digunakan sebagai penanda atau akses untuk mendapatkan manfaat dari Program Petani Mandiri (PPM).

Kesejahteraan dapat di artikan sangat luas yang di diterapkan skala sosial besar dan kecil sebagai contoh keluarga dan individu. Konsep kesejahteraan atau rasa sejahtera yang bersifat relatif, tergantung dari penilaian masing-masing individu. Sejahtera menurut seseorang dengan tingkat pendapatan tertentu belum tentu dinamakan sejahtera bagi orang lain (Regina Arisandi, 2016).

Diterbitkannya kebijakan ini sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Lahirnya undang-undang ini didasari pertimbangan bahwa meningkatnya perubahan iklim, risiko harga, kegagalan panen, kerentanan terhadap bencana alam, globalisasi dan gejolak ekonomi global. Undang-undang tersebut menjadi dasar pemerintah Kabupaten bojonegoro guna meningkatkan kesejahteraan Petani yang tertuang pada Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri.

Manfaat program Petani Mandiri (PPM) terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga petani, yakni sebagai berikut : Bantuan modal, Memberikan akses prioritas pelatihan dan pengembangan usaha tani, jaminan

pembelian hasil pertanian, Asuransi gagal panen, dan sebagai akses memperoleh beasiswa bagi anak keluarga petani. Untuk mendapatkan bantuan dari Program Petani Mandiri (PPM) para petani harus memenuhi persyaratan diantaranya :

- a. Terdaftar sebagai anggota kelompok tani setempat.
- b. Memiliki Kartu Petani Mandiri (KPM).
- c. Kepala keluarga yang tidak mendapatkan bantuan hibah terus menerus dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- d. Membuat surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang bersangkutan.

Dikutip dari website damarinfo Bojonegoro alokasi anggaran tahun 2019 untuk Program Petani Mandiri Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp.40.000.000.000, dari anggaran tersebut yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.400.000.000 untuk 99 Kelompok Tani (Poktan). Pada tahun 2020, besaran anggaran dinaikan menjadi Rp. 59.000.000.000 dengan sasaran penerima 405 Poktan. Hingga 18 november 2020 jumlah yang teralisasi sebesar Rp.33.406.011.176 untuk 277 Poktan. Alokasi anggaran untuk PPM terus dinaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 2021 dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) anggaran untuk PPM dialokasikan sebesar Rp.92.500.000.000 untuk 503 Poktan yang beranggotakan 57 ribu petani.

Menurut Anam warsito selaku ketua cabang pemuda tani HKTI Bojonegoro mengatakan sasaran KPM tidak merata. Secara geografis, wilayah Bojonegoro 30% lebih lahan hutan. Banyak petani yang memanfaatkan di lahan perhutani. Petani di pinggir hutan tersebut tidak tersentuh oleh Program Petani Mandiri (Medcom.id,2020). Dari permasalahan diatas peneliti ingin menggali tentang efektivitas Program Petani Mandiri. Efektivitas Menurut Para ahli yaitu Ravianto dan Subagyo dapat disimpulkan bahwa Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan harus sesuai antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian dapat dilakukan penelitian mengenai Efektivitas Program Petani Mandiri (PPM) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga petani di Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro.

METODE

Fokus penelitian ini menggunakan teori efektivitas program menurut Sawir dan Hafid (2020) yang meliputi beberapa indikator diantaranya:

1. *Formulation of Purpose* (Perumusan tujuan)

Konsep ini Untuk mencapai sebuah tujuan diperlukan aturan, prosedur, dan birokrasi pada PPM.

2. *Activity of Description* (Deskripsi Kegiatan) Mengetahui berbagai pelaksanaan kegiatan pada Program Petani Mandiri (PPM) yang telah dilaksanakan sampai saat ini.
3. *Evaluation* (Evaluasi) Evaluasi pada pelaksanaan Program Petani Mandiri bertujuan untuk mengetahui efektivitas program yang telah terlaksana sampai saat ini.
4. *Organizational Actors Characteristics* (Karakteristik Aktor Organisasi) Memperoleh informasi terkait bidang di Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dan pihak terkait PPM di Desa beji
5. *Worker Charasteristics* (Karakteristik Pekerja) Mengetahui apakah pekerja memiliki kemampuan dan motivasi untuk mencapai tujuan dari Program Petani Mandiri.
6. *Management Policies and Practice* (Kebijakan dan Praktik Manajemen) Koordinasi dari pihak Dinas Pertanian dan beberapa pihak yang terkait PPM.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi sebagai cara untuk mendapatkan informasi yang akurat serta menggunakan teknik observasi untuk mencatat dan mengamati fenomena-fenomena yang diselidiki. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Hamidi & Maulana,2020). Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara. Pada proses pengumpulan data, dilakukan dengan wawancara kepada 1) Kepala Bidang SDM dan Pemberdayaan 2) Kepala Seksi investasi dan pembiayaan usaha tani, 3) Ketua Kelompok tani Desa Beji, 4) Ketua Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Kedewan 5) beberapa petani desa Beji. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan sektor pertanian merupakan upaya pemerintah untuk selalu menambah produksi, produktifitas petani, dan meningkatkan pendapatan petani. Salah satu hal yang menjadi permasalahan pada sektor pertanian di Indonesia pada saat ini adalah rendahnya produktivitas sektor pertanian dan rendahnya tingkat kesejahteraan petani. Dengan permasalahan tersebut maka pemerintah Kabupaten Bojonegoro membuat kebijakan pertanian yaitu Program Petani mandiri.

Program Petani Mandiri adalah hibah berupa modal yang berwujud barang seperti pupuk,benih dan

bibit tanaman pertanian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan kemandirian bagi petani. Program petani mandiri telah dijalankan di Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro Tetapi belum semua petani di Desa Beji merasakan dampak adanya program petani mandiri. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu keluarga petani di Desa Beji yaitu mbah Sugianto beliau mengungkapkan :

“Pernah disuruh mengumpulkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan surat pajak lahan pertanian tapi sampai saat ini belum mendapatkan Kartu yang dikeluarkan pemerintah kabupaten. Banyak orang kaya keluarga atau kerabat dari pengurus desa yang mendapatkan bantuan pupuk”. (wawancara tanggal 26 Desember 2021).

Hal ini juga dirasakan salah satu warga yang belum merasakan adanya program petani mandiri beliau mengungkapkan :

“Ketika musim tanam tiba kami masih kesulitan mendapatkan pupuk, sampai saat ini kami baru mendapatkan 2 kali pupuk subsidi”. (wawancara tanggal 26 Desember 2021).

teori Efektifitas Program menurut Sawir dan Hafid (2020) yang meliputi :

Formulation Of Purpose(Perumusan Tujuan)

Program petani mandiri merupakan program unggulan dari Bupati Kabupaten Bojonegoro yaitu ibu Anna Mu’awanah yang tujuannya memberikan perhatian terhadap sektor pertanian yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga petani dan meningkatkan taraf hidup petani pada masa pandemi. Hal yang melatarbelakangi terbentuknya program petani mandiri adalah Kurangnya modal petani dalam menggarap sawah, Tingkat kesejahteraan petani masih rendah, Kurangnya kontribusi dan antusias pemuda dalam terjun ke sektor pertanian.

Pada pasal 1 Peraturan Bupati Bojonegoro No 49 tahun 2021 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2018 berbunyi Program Petani Mandiri adalah akses atau prgram atau manfaat kepada petani baik berupa hibah atau akses manfaat untuk memberikan kesejahteraan dan kemandirian bagi petani.

Mekanisme untuk mendapatkan manfaat Program Petani Mandiri tertuang pada pasal 7 Peraturan Bupati 49 tahun 2021 yaitu Poktan mengajukan usulan permohonan penerbitan KPM plus ke Bupati melalui kepala Dinas Pertanian kemudian permohonan tersebut perlu di verifikasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro. Hasil verifikasi dari Dinas Pertanian diusulkan ke Bupati untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Dasar pelaksanaan program petani mandiri tertuang pada :

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani.
2. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 tahun 2018 tentang program petani mandiri
3. Peraturan Bupati Bojonegoro No 49 tahun 2021 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
4. Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati nomor 48 tahun 2018 tentang Program Program Mandiri
5. Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri
6. Peraturan Bupati Bojonegoro No 49 tahun 2021 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri
7. Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber pada APBD

Tujuan Program Petani Mandiri Sebagai berikut:

1. Pemberian Bantuan benih dan pupuk (SAPRODI)

Bantuan benih dan pupuk merupakan modal Usaha tani sebagai upaya membantu petani ketika musim tanam. Distribusi bantuan dan pupuk diserahkan ke ketua kelompok tani desa masing-masing. Pembelanjaan Saprodi disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terlampir di proposal pengajuan dan tidak melebihi Rp. 2.500.00 per Hektare .

Tabel 3.1
Pemberian Pupuk dan Benih Per Hektare

	PADI	JAGUNG
Benih	25 kg	15 kg
Pupuk	300 kg	150 kg
	Bawang merah	Tembakau
Pupuk	150 kg	150 kg

Sumber : Dinas pertanian Kab.Bojonegoro,2022

2. Pelatihan dan pengembangan tani

Program petani mandiri memberikan pelatihan dan pengembangan usaha tani seperti pelatihan kerajinan tangan, pengolahan hasil pertanian, desain kemasan dll. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Ibu Yunia selaku Kepala Bidang SDM dan pembiayaan :

“Program petani mandiri memberikan akses keluarga petani untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan usaha tani seperti untuk istri para petani mendapatkan pelatihan budidaya, kerajinan tangan dan kemudian anaknya mendapatkan pelatihan seperti membuat *marketplace* dan membuat konten youtube mengenai pertanian”.(Wawancara tanggal 17 januari 2022).

Pemberdayaan perempuan sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya terutama pada keluarga petani melalui strategi pelatihan usaha tani (Trisna, N Rining dan Tukiman,2019). Akses pelatihan dan pengembangan Tani belum dirasakan oleh para petani maupun anggota kelompok tani penerima bantuan program petani mandiri di Desa Beji kecamatan kedewan. Hal itu senada dengan yang diungkapkan Pak Kasno selaku Ketua Kelompok tani di Desa Beji :

“Program petani mandiri sangat membantu petani di desa beji tetapi Pada akses pelatihan dan pengembangan usaha tani sampai saat ini belum berjalan”. (Wawancara tanggal 26 desember 2021).

Jika pelatihan dan pengembangan keluarga tani dapat terealisasi dengan baik maka pemerintah desa maupun pihak swasta bermitra bisnis dengan istri/anak keluarga petani dalam hal menjual kerajinan tangan yang telah dibuat. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi mandiri. Jenis program kemitraan bisa dengan pemberian pinjaman modal kerja atau pembelian aktiva tetap produksi untuk meningkatkan produksi dan penjualan produk (Rahayu,Kurniawan dan Prabawati,2018). Dengan adanya mitra bisnis atau usaha maka akan menambah pendapatan keluarga petani.

3. Jaminan pembelian hasil pertanian

Pembelian hasil pertanian bekerjasama dengan BUMDes tiap desa masing-masing. Setiap BUMDes mendapatkan dana 100 juta dari pemerintah kabupaten yang gunanya membeli hasil pertanian ketika mengalami anjloknya harga dipasaran. Hal tersebut untuk menghindari permainan harga tengkulak. Tetapi di desa beji manfaat ini belum

berjalan. Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan pak Kasno :

“Untuk jaminan pembelian hasil panen di desa ini masih belum berjalan. Sudah ada sosialisasi tetapi sampai saat ini petani tidak membuat asuransi terkait gagal panen. Kalau di desa lain sudah di jalankan”.(Wawancara tanggal 26 Desember 2021)

4. Asuransi gagal panen

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan premi yang 100% ditanggung oleh pemerintah yaitu 20% dari APBD dan 80% APBN. Hal tersebut senada yang diungkapkan oleh Ibu Yunia selaku Kepala Bidang SDM dan pembiayaan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro:

“petani yang harusnya membayar 144.000 untuk mengasuransi padinya tetapi dengan adanya program ini petani tidak perlu bayar lagi untuk mengasuransikan padinya karena setelah dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semakin sedikit petani yang mendaftarkan asuransi gagal panen sehingga keberhasilan pertanian di Kabupaten Bojonegoro semakin maju”.(Wawancara tanggal 17 januari 2022)

Ganti rugi akibat serangan hama, kekeringan, dan banjir sebesar Rp. 6.000.000 per hektare selama 1 musim tanam. Pendaftarannya dapat dilakukan *online* lewat aplikasi SIAP AUTP.

5. Beasiswa

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lewat Dinas pendidikan memiliki program beasiswa satu desa dua sarjana yang dapat diakses melalui program petani mandiri.

Untuk mendapatkan akses bantuan-bantuan dari Program Petani Mandiri, Para petani wajib memiliki Kartu petani mandiri. Hal itu senada yang diungkapkan Ibu Yunia selaku Kepala Bidang SDM dan pembiayaan:

“jika tidak memiliki KPM Plus tidak dapat mendapatkan 5 manfaat program petani mandiri. Ibaratnya Program petani mandiri merupakan sebagai Rumah dan KPM plus adalah kuncinya”.(Wawancara tanggal 17 januari 2022).

Sasaran Program ini adalah para petani di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki lahan kurang dari 2 hektare dan lahan pertaniannya masih di kawasan Kabupaten Bojonegoro bukan termasuk lahan hutan dan lahan irigasi serta memiliki surat keterangan kepemilikan yang sah. Petani yang tergabung dalam kelompok tani adalah Mereka yang berprofesi sebagai petani di berbagai lahan. Tetapi, mereka yang tergabung dalam kelompok

tani belum tentu mendapatkan manfaat dari Program Petani Mandiri karena terdapat kriteria untuk mendapatkan manfaat tersebut. Untuk menerima manfaat program petani mandiri akan dilakukan secara bergantian misalnya di Desa Beji petani yang telah mendapatkan KPM dan pada periode tanam tahun ini mendapatkan bantuan SAPRODI maka pada periode tanam selanjutnya mereka tidak menerima manfaat PPM benih dan Pupuk karena sistemnya bergantian. Pada penerbitan KPM Dilakukan secara bertahap dan akan dikordinir oleh ketua kelompok tani di masing-masing Desa.

Hal itu senada dengan wawancara dengan pak Afandi selaku ketua penyuluhan pertanian Kecamatan kedewan

“Belum tentu semua anggota kelompok tani mendapatkan Kartu petani mandiri karena terdapat kriteria yang harus dipenuhi, tetapi mereka yang menerima KPM sudah pasti ikut dalam anggota kelompok tani. Contoh mudahnya petani lahan hutan yang tergabung dalam kelompok tani tetapi tidak memiliki surat perjanjian kerjasama dengan perhutani maka mereka tidak dapat menerima manfaat PPM” (Wawancara tanggal 25 Juni 2022).

Berdasarkan analisis pada indikator Formulation of purpose maka dapat disimpulkan bahwa pada perumusan tujuan Program petani mandiri sudah tepat. Dari landasan dasar sebagai bahan pijakan program petani mandiri sangat runtut serta manfaat dari program tersebut sudah dirasa cukup walaupun terdapat akses manfaat yang belum terlaksana di desa Beji Kecamatan Kedewan.

Activity Of Description(Deskripsi Kegiatan)

Deskripsi kegiatan adalah suatu paragraf yang menggambarkan suatu aktifitas kegiatan secara detail dan terperinci sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang sebenarnya. Program petani mandiri merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pada RPJMD Tahun 2018-2023, Sektor pertanian merupakan sektor prioritas pemerintah kabupaten bojonegoro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengenalkan Program petanin mandiri ke masyarakat, Bupati Bojonegoro bekerjasama dengan pihak-pihak terkait salah satunya adalah Dinas Pertanian melakukan Sosialisasi di setiap kecamatan. Dengan adanya program Petani mandiri sangat membantu petani dalam musim tanam dan musim panen. Hal ini senada dengan Ibu Selvi Virginita selaku Ketua seksi investasi dan pembiayaan usaha tani.

“Adanya program petani mandiri ini petani sangat diuntungkan dari mudahnya mendapatkan pupuk dan pelatihan dan program ini juga yang mengantarkan bupati Bojonegoro memperoleh penghargaan”.(Wawancara tanggal 17 januari 2022)

Tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan fakta yang dilapangan. Peneliti menerima banyak keluhan petani di desa Beji kecamatan Kedewan karena mereka kesulitan mendapatkan pupuk ketika musim tanam tiba.

Untuk mendapatkan manfaat dari Program Petani mandiri, para petani di Kabupaten Bojonegoro harus memiliki Kartu petani mandiri plus sebagai akses untuk mendapatkan bantuan. Distribusi KPM Plus sudah mencapai 102.822 Kepala keluarga petani di Kabupaten Bojonegoro. Harapan dari Bupati Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 Kartu petani Mandiri plus harus sudah tuntas supaya semua petani Kabupaten Bojonegoro mendapatkan manfaat Program Petani Mandiri. Hal tersebut senada dengan ibu Selvy Virginita selaku Kepala seksi investasi dan pembiayaan usaha tani.

“Keinginannya pada tahun 2022 Kartu petani mandiri plus harus tuntas dan sasarannya sekitar 213.000 petani atau sekitar 1068 kelompok tani. Harapannya semua petani mendapatkan semua manfaat dari Program Petani Mandiri”. (Wawancara Tanggal 17 januari 2022).

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2019 Petani yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan manfaat dari Program Petani Mandiri sebanyak 19.966 Kepala Keluarga yang tersebar di 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 2020 petani yang telah menerima KPM sebanyak 50.967 Kepala keluarga yang tersebar di 17 kecamatan. Tahun 2021 Petani yang telah menerima KPM Sebanyak 65.810 Kepala Keluarga yang terbagi di 21 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Total dalam 3 tahun terakhir Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan Kartu Petani Mandiri sebanyak 136.743 Ke petani yang telah memenuhi kriteria.

Untuk mendapatkan manfaat Program Petani mandiri salah satunya hibah bantuan pupuk petani harus melalui beberapa tahapan dari kelompok tani ke dinas pertanian. Hal itu senada dengan ibu Selvi Virginita selaku kepala Seksi Investasi dan pembiayaan usaha tani.

“Kelompok tani berkoordinasi dengan ketua kelompok tani kemudian ketua kelompok tani mengusulkan nama-nama petani ke dinas pertanian, selanjutnya usulan tersebut disampaikan ke ibu bupati, kemudian dari ibu bupati akan masuk ke anggaran kabupaten setelah kami mendapatkan anggaran kabupaten. Kemudian kami mengusulkan kembali penerima program petani mandiri dan menunggu Surat keputusan Bupati. Setelah ada SK para petani mengajukan proposal pencairan sesuai masa tanam mereka”. (wawancara tanggal 17 Januari 2022)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Selvi diatas, ketua kelompok tani sebagai penghubung antara petani dan dinas pertanian Kabupaten Bojonegoro. Petani desa Beji yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan manfaat dari Program Petani Mandiri mengumpulkan berkasnya ke Ketua Kelompok tani kemudian Ketua kelompok tani memberikan Nama-nama petani berserta berkas tersebut Ke dinas pertanian Kabupaten Bojonegoro. Dokumen petani yang sudah masuk di dinas pertanian akan di lihat lagi dari Kartu keluarga dan Surat Kepemilikan lahan atas nama pribadi serta bukan termasuk lahan hutan dan saluran irigasi. Proses birokrasi yang terlalu panjang menyebabkan para petani membeli pupuk dan benih dengan uang pribadinya sendiri. Hal tersebut senada yang yang diungkapkan pak Kasno selaku ketua kelompok Tani Desa Beji :

“Bantuan pupuk terakhir kemarin bulan desember pada musim tanam jagung. Sehingga petani membeli bibit dengan menggunakan uang pribadinya” (wawancara tanggal 26 Desember 2021)

Dengan proses yang panjang tersebut, sehingga Bantuan Hibah pupuk dan benih yang diterima para petani mengalami keterlambatan bahkan bantuan pupuk dan benih datang setelah petani selesai musim tanam tiba.

Evaluation(Evaluasi)

Evaluasi program adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan pada sebuah program yang telah terlaksana selama ini. Tujuan evaluasi program adalah mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan (Mulyatingsih,2011). Pada evaluasi program pelaksana ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program. Jika tujuan program tersebut belum tercapai maka pelaksana ingin mengetahui letak kekurangannya dan apa sebabnya.

Pada Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 25 tahun 2021 pasal 10 disebutkan fungsi-fungsi dari Bidang Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan yang salah satunya terkait pemantauan dan evaluasi di bidang Sumber daya manusia dan pembiayaan pertanian serta melakukan monitoring dan supervisi kepada penyuluh pertanian ,apaarat pertanian dan kelembagaan petani.

Dinas pertanian khususnya pada bidang SDM dan pembiayaan melakukan tiga sistem evaluasi yaitu sistem evaluasi internal, evaluasi bidang dan evaluasi lapangan. Pada Evaluasi lapangan, terkait program petani mandiri dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Monitoring diadakan oleh dinas pertanian dengan ketua penyuluhan

pertanian per kecamatan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah bantuan hibah tersebut sudah dibagikan sesuai luas lahan serta untuk mengetahui bibit yang telah tersalurkan kepada petani telah di tanam saat musim tanam. Hal tersebut sebagai upaya pengawasan dan pengontrolan dari dinas pertanian terhadap kemajuan program petani mandiri per kecamatan. Kemudian evaluasi internal pada program petani mandiri dilakukan oleh Bidang SDM dan pembiayaan usaha tani yaitu dengan melakukan rapat internal dengan ibu Kepala Dinas Pertanian yang membahas sejauh mana program tersebut telah dilaksanakan, kemajuan dari penerbitan kartu petnai mandiri dan hambatan-hambatan. Sistem evaluasi yang terakhir adalah sistem evaluasi yang dilaksanakan internal bidang. Untuk evaluasi ini dilaksanakan setiap satu minggu sekali untuk merencanakan program yang kan dilaksanakan. Hal tersebut senada yang diungkapkan Ibu Yunia selaku Kepala bidang SDM dan pembiayaan :

“Evaluasi Program petani mandiri di bidang ini dilaksanakan tiap satu minggu sekali. Biasanya kita membuat schedule untuk membuat rencana tiap minggunya seperti rencana pencairan, target pembuatan KPM plus minggu ini, Pengajuan Surat Keputusan (SK) ke bupati”. (Wawancara tanggal 17 januari 2022)

Kendala dari Program Petani Mandiri adalah petani-Petani yang menggarap tanaman di kawasan hutan belum semua mendapatkan manfaat dari program petani mandiri. Karena untuk mendapatkan bantuan bagi petani di lahan kawasan hutan harus ada PKS (Perjanjian Kerja Sama). Hal itu senada yang diungkapkan Ibu Yunia :

“Kendala saat ini adalah untuk petani kawasan hutan belum semua terakomodir mendapatkan bantuan dari PPM. Untuk mendapatkan bantuan petani harus ada Perjanjian Kerja Sama dari Perhutani karena lahan kawasan ada aturannya seperti berapa luas kawasan hutan yang boleh atau dibuka ditanami hal tersebut juga sama untuk petani di lahan selovale atau lahan milik pengairan harus melampirkan Surat pajak tanah”. (Wawancara tanggal 17 januari 2022)

Kendala lain terhadap petani hutan yang menggarap tanaman juga diungkapkan oleh pak Kasno selaku ketua Kelompok Tani Desa Beji :

“ketika penarikan hasil panen kawasan hutan banyak petani yang mengaku lahan sewanya sedikit untuk mengurangi biaya penarikan padahal perhutani telah memberikan akses untuk para petani. Untuk samapai saat ini petani lahan hutan belum bisa menerima bantuan dari PPM”. (wawancara tanggal 26 desember 2021)

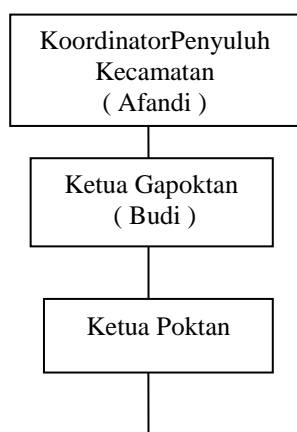
Upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro sedikit demi sedikit telah mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan kendala tersebut dengan cara Petani-Petani kawasan Hutan berhak

mendapatkan bantuan pupuk dan benih tetapi harus memiliki Perjanjian Kerjasama Tetapi sampai saat ini belum bisa akses untuk mendapatkan Kartu Petani Mandiri.

Characteristic Actors Organization (Karakteristik Aktor Organisasi)

Aktor organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan. Pada dasarnya keberhasilan sebuah program tergantung dengan aktor organisasi yang ada didalamnya. Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro yang bertanggung jawab pada Program Petani Mandiri adalah Bidang Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan.

**Tabel 3.2
Penanggung Jawab PPM Desa Beji**



Jaya makmur 1	Jaya makmur 2	Jaya makmur 3
81	126	98

Sumber :Penanggung jawab PPM Desa Beji,2022

Terdapat perubahan struktur organisasi di Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro yang tertuang pada peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 tahun 2021 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Pada Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2021 pasal 10 ayat 1 berbunyi “ Bidang Sumber Daya Manusia dan pembiayaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan”. Pada Peraturan Bupati tersebut Bidang SDM dan pembiayaan memiliki fungsi salah satunya adalah Penyiapan,perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan ketenagaan, informasi dan teknologi serta investasi dan pembiayaan usaha tani. Bidang SDM dan Pembiayaan juga memiliki fungsi dalam penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian. Hal tersebut menjadi tanggungjawab Bidang SDM dan Pembiayaan dalam keberhasilan Program petani Mandiri.

Perubahan kedudukan,susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi di Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro tidak mempengaruhi fungsi dari Bidang SDM dan Pembiayaan. Tetapi dengan sedikitnya pegawai dari setiap sub koordinator pada Bidang SDM dan Pembiayaan mempengaruhi dalam hal memonitoring berjalannya Program Petani Mandiri. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Ibu Yunia selaku kepala bidang SDM dan pembiayaan :

“Kita tidak bisa terjun ke setiap desa untuk memonitoring berjalannya Program Petani Mandiri. Kita biasanya random ke desa untuk melihat keberhasilan dari PPM. Alasannya karena keterbatasan pegawai dibidang kita”. (Wawancara tanggal 17 Januari 2022)

Koordinator penyuluhan pertanian kecamatan yang menjembatani antara Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dengan kelompok tani. Informasi yang yang diterimas dari seksi Investasi dan Pembiayaan Usaha tani disampaikan koordinator penyuluh kecamatan ke ketua Gapoktan masing-masing desa. Ketua Gapoktan Memiliki peran mengambil keputusan dan menentukan pengembangan produksi usaha tani. Ketua gapoktan selalu berkoordinasi maupun memberikan arahan kepada ketua Poktan dalam pelaksanaan Program Petani Mandiri (PPM). Dari temuan diatas maka perubahan struktur organisasi yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2021 tidak mempengaruhi fungsi dari Bidang SDM dan pembiayaan tetapi sedikit mempengaruhi organisasi struktural dalam melaksanakan dan mempercepat keberhasilan suatu kebijakan karena pada sub koordinator penyuluh pertanian mengalami kekosongan pegawai. Dengan kekosongan tersebut maka Dinas pertanian belum dapat membagi pegawai nya untuk meninjau langsung berjalannya Program Petani Mandiri di setiap desa.

Worker Characteristic (Karakteristik Pekerja)

Karakteristik pekerja adalah suatu uraian yang memberikan informasi dari pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan. Dalam hal ini peneliti ingin menjabarkan karakteristik petani di Desa Beji Kecamatan Kedewan.

Petani di Desa Beji dikategorikan petani usianya kurang produktif. Desa Beji masih kekurangan petani muda sehingga hal tesebut mengurangi kreatifitas serta inovasi di bidang pertanian. Pemuda di Desa Beji lebih memilih kerja di industri kilang minyak solar. Hal tersebut senada dengan Pak Afandi selaku Ketua Penyuluh Pertanian Kecamatan Kedewan

“Desa Beji masih kekurangan petani muda, tidak seperti desa sebelah antara petani usia

produktif dan usia kurang produktif berimbang”

(Wawancara tanggal 13 februari 2022).

Mayoritas petani di desa Beji yang dapat dikategorikan petani usia kurang produktif juga mempengaruhi cara petani dalam mengelola lahan pertanian masih menggunakan cara penegelolaan sama yang mereka ikuti sejak jaman dahulu atau masih dikategorikan menggunakan sistem tradisional. Hal tersebut senada dengan Pak Kasno selaku ketua kelompok tani.

“Banyak petani disini yang masih belum memahami tentang pengelolaan lahan seperti tanah seperti apa yang cocok dengan tanamannya sehingga petani masih mengikuti sistem tradisional”(wawancara tanggal 26 Desember 2021).

Harus adanya pelatihan terkait cara pengelolaan lahan pertanian di Desa Beji Kecamatan Kedewan.

Permasalahan utama yang dikeluhkan para petani di desa beji adalah sulitnya mendapatkan pupuk pada musim tanam dan gagal panen karena diserang hama. Hal itu senada dengan Pak Supardi salah satu petani di desa Beji

“Saat musim tanam kita kesulitan mencari pupuk subsidi dan tiap musim tanam harga pupuk semakin naik hal tersebut sangat memberatkan kami sebagai petani” (wawancara tanggal 13 februari 2022).

Permasalahan lain yang dikeluhkan petani di Desa Beji adalah kegagalan Panen akibat serangan hama tikus. Permasalahan tersebut telah terjadi beberapa tahun terakhir. Terdapat solusi untuk terhindar dari serangan hama tikus di Desa Beji yaitu dengan mendirikan Rumah Burung Hantu yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 agustus 2021 dengan bantuan Kepala dinas ketahanan Pangan dan pertanian Kabupaten Bojonegoro. Dengan adanya rumah burung hantu maka kegagalan panen akibat hama tikus semakin menurun. Hal tersebut senada dengan pak kasdi selaku salah satu petani di desa beji :

“Sudah setahun lebih hama tikus semakin berkurang mas sejak adanya omah koko beluk (burung hantu), sebelum ada itu kita pakai cara seperti obat hama untuk membasmi tikus disawah”

Dengan keberhasilan Desa Beji dalam membasmi hama tikus dengan cara pembuatan rumah burung hantu, sekarang cara tersebut di adopsi desa lain sebagai cara membasmi tikus hama pertanian.



Gambar 3.1

Peresmian Koko beloq sahabat petani yang dihadiri Bupati Kabupaten Bojonegoro

Sumber : Dokumen Ketua Gapoktan Desa Beji,2022

Para Petani Desa Beji Kecamatan Kedewan banyak yang belum mengerti tentang Program Petani Mandiri (PPM). Dari Hasil wawancara di RT 01, RT 04,Dan RT 19 Masih banyak Keluarga petani yang mengetahui manfaat Program Petani Mnadiri beserta Kartu Petani Mandiri. Dalam wawancara yang telah dilaksanakan, mereka menganggap Kartu Petani mandiri sama dengan Kartu Tani yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Semua Petani yang masu kriteria penerima manfaat program petani Mandiri di Desa Beji RT 19 Sampai saat ini belum menerima Kartu Petani Mandiri. Hal tersebut senada dengan pak Parman salah satu petani di desa Beji:

“Semua petani di RT.19 belum mendapatkan kartu seperti itu mas, dulu sudah disuruh mengumpulkan KK,Pajak tanah tetapi samapai saat ini belum mendapatkan kartunya. Sudah setahun lebih. Tetapi ketua RT nya sudah dapat mas”

Para petani yang telah mendaftar dan menyerahkan dokumennya ke ketua kelompok tani tetapi sudaah setahun lebih belum mendapatkan manfaat satupun dari Program Petani Mandiri. Mereka yang belum mendapatkan KPM telah menyalurkan aspirasinya ke ketua kelompok tani tetapi tidak ada penjelasan yang jelas dari Ketua Kelompok tani setempat. Kurangnya koordinasi antara petani dan Ketua RT.19 yang mempengaruhi pemerataan mendapatkan manfaat Dari Program Petani Mandiri (PPM). Menurut tuturan petani Di RT.19, Ketua RT baru memberitahu ketika dia sudah mengumpulkan terlebih dahulu. Permasalahan terkait masih banyaknya petani di desa Beji yang belum mendapatkan Manfaat program Petani Mandiri hal itu berbeda pendapat dengan Ibu Selvi Virginita selaku Ketua Seksi investasi dan pembiayaan usaha tani.

“ untuk di desa beji sudah semua terverifikasi mas, kalau ada keluhan masyarakat desa Beji yang belum menerima KPM jangan-jangan mereka belum mengumpulkan Persyaratan, jangan-jangan mereka menggarap lahan hutan. Kalau memang persyaratannya sudah lengkap dan masuk kriteria tetapi belum mendapatkan minta tolong ya mas

untuk di data dan bisa diajukan ke kantor langsung”
(wawancara tanggal 17 januari 2022).

Pernyataan serupa juga diungkapkan Pak Afandi selaku Ketua Penyuluh Tani Kecamatan Kedewan.

“ Untuk di desa beji sejauh ini lengkap mas. Tapi kalau ada yang sudah setor tapi belum mendapatkan manfaat Program petani mandiri, tolong digali lagi nanti tanyakan apa alasannya belum mendapatkan Kartu petani mandiri. dan coba tanyakan ke ketua Gapoktannya mas karena administrasi petani di desa beji dibantu oleh pak budi gapoktan” (wawancara tanggal 13 februari 2022)

Terjadi perbedaan pernyataan dari Ibu Selvy selaku seksi pembiayaan dan usaha tani, pak Afandi selaku ketua penyuluh pertanian Kecamatan Kedewan dengan pernyataan petani di Desa Beji. Dari hasil wawancara beberapa petani menuturkan bahwa mereka yang dapat adalah mereka yang dekat entah sebagai kerabat maupun saudara dari ketua kelompok tani dan gapoktan.

Management Policies and Practice (Kebijakan dan Praktek manajemen)

Kebijakan dan paraktik manajemen merupakan suatu kegiatan yang terarah secara proposional untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Untuk mencapai tujuan suatu program harus ada tujuan organisasi yang jelas terkait program. Langkah-langkah strategis harus dirumuskan melalui proses perencanaan strategis. Harus adanya koordinasi di semua tingkatan lembaga yang berkaitan dengan suatu program agar pencapaian suatu tujuan dilakukan secara terkoordinasi dan terorganisir.

Pada Pelaksanaan Program Petani Mandiri (PPM) Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro bekerjasama dengan lembaga lain dalam terlaksananya Program Petani Mandiri dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pada praktiknya untuk melaksanakan manfaat dari Program Petani mandiri bekerja sama dengan beberapa dinas/lembaga di Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut sudah terlihat pada saat sosialisasi program petani mandiri di setiap Desa yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bojonegoro, Kepala Pertanian, Dinas Pendidikan dan Disperinaker Kabupaten Bojonegoro. Dinas pertanian bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bojonegoro untuk menangani manfaat Program petani mandiri yaitu Jaminan Hasil Panen. Pada manfaat ini ada kerjasama antara Dinas pertanian dan Dinas PMD karena jaminan pembelian melalui BUMDes Desa setempat. Kemudian Pada pelaksanaan manfaat PPM lainnya seperti pelatihan dan pengembangan Usaha Tani Dinas pertanian bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja. Bagi keluarga petani pemegang kartu petani mandiri berhak mendapatkan akses pelatihan dan pengembangan usaha

tani. Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Bojonegoro memberikan modul pelatihan agar keluarga petani dari anak hingga istrinya mendapatkan pelatihan yang nantinya sangat penting untuk membuka usaha dibidang pertanian. Yang ketiga Pada manfaat akses beasiswa Dinas Pertanian bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dalam pemeberian fasilitas bagi Putra-putri keluarga petani untuk menempuh jenjang pendidikan hingga tingkat sarjana. Tetapi Dinas pertanian belum mengetahui berapa banyak anak petani yang mendapatkan akses beasiswa. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Ibu Yunia selaku kepala Bidang sumber daya manusia (SDM) Dan Pembiayaan.

“Saat ini kami belum mendapatkan data jumlah anak petani yang mendapatkann akses beasiswa dari Program Petani Mandiri tetapi kita akan jemput bola untuk mendapatkan data dari Dinas pendidikan untuk mengetahui jumlah anak petani yang mendapatkan Beasiswa”.(Wawancara tanggal 17 januari 2022).

Kerjasama antar lembaga terkait, Program Petani mandiri dimaksudkan untuk pencapaian program tersebut lebih efektif dan dampaknya benar-benar dirasakan oleh keluarga petani.

PENUTUP

Kesimpulan

Program Petani Mandiri adalah hibah berupa modal yang berwujud barang kepada petani untuk memberikan kesejahteraan dan kemandirian petani, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga petani di Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, efektifitas Program Petani Mandiri (PPM) Di Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan sudah efektif. Jika dikaji dari indikator teori Efektifitas Program menurut Sawir dan Hafidz masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat terpenuhi dikarenakan Keluarga petani di desa Beji masih belum menerima beberapa manfaat dari Program Petani Mandiri. Berdasarkan indikator *Characteristic actor organization*, Seksi Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan usaha tani masih kekurangan Pegawai untuk memantau sejauh mana keberhasilan Program Petani Mandiri di setiap Desa.

Pada indikator *worker characteristic*, Masih terdapat masyarakat Desa beji yang memiliki lahan pertanian dan memenuhi syarat penerima manfaat Program Petani Mandiri tetapi sampai saat ini masih belum menerima manfaat dari program petani mandiri. Padahal Keluarga Petani telah mengumpulkan persyaratan untuk mendapatkan bantuan Program Petani Mandiri tetapi lebih

dari setahun keluarga petani tersebut belum mendapatkan bantuan dari Program petani Mandiri.

Selain itu, permasalahan lainnya yang terjadi di desa Beji adalah kurangnya sosialisasi tentang Program Petani Mandiri sehingga masyarakat terlambat mengumpulkan persyaratan untuk mendapatkan Kartu Petani Mandiri, disisi lain Ketua RT telah mendaftar terlebih dahulu tanpa memberi sosialisasi kepada warganya.

Terkait permasalahan pemerataan penerima KPM dapat disimpulkan Bahwatidak semua petani yang tergabung dalam anggota tani mendapatkan Kartu Petani Mandiri serta Petani yang sudah mengumpulkan dokumennya masih harus di cek oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro terkait Kartu Keluarga, kepemilikan lahan pertanian dan kriteria lainnya sehingga hal tersebut menjadi kecemasan petani karena sudah menunggu lama tetapi belum mendapatkan manfaat dari Program Petani Mandiri.

Saran

Berdarkan penelitian yang telah dilakukan, Peneliti memiliki beberapa saran yang dapat digunakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dan Pihak-Pihak yang bertanggung jawab terhadap Program Petani di Desa Beji. Diharapkan keluarga petani di Desa Beji yang memenuhi persyaratan dapat terbantu dengan adanya Program Petani Mandiri (PPM). Berikut saran yang akan diberikan:

1. Peneliti memiliki saran untuk menempatkan kembali pegawai dalam sub koordinator penyuluhan agar memantau keberhasilan PPM dan mendapatkan informasi dari tiap desa terkait PPM
2. Peneliti memiliki saran terhadap pihak-pihak terkait PPM alangkah baiknya lebih sering melakukan koordinasi Koordinasi tersebut dapat dilaksanakan satu bulan sebelum masa tanam tiba.
3. Terkait permasalahan pemerataan penerima KPM, peneliti memiliki saran kepada pihak terkait agar memberikan sosialisasi lagi terkait kriteria, sasaran PPM agar tidak menimbulkan kesalahfahaman di petani.
4. Terkait petani hutan, Walaupun nantinya petani hutan tidak mendapatkan KPM, peneliti memiliki masukan agar petani hutan terdata dan mendapatakan setidaknya dua bantuan dari lima manfaat Program Petani Mandiri. Khususnya manfaat benih pupuk dan beasiswa kepada anak petani karena hal tersebut dapat meringankan beban keluarga petani di Kabupaten Bojonegoro.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti sangat berterimakasih kepada berbagai pihak yang turut berperan dalam terselesaikannya artikel ilmiah ini yaitu :

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Kedua Orang tua dan adek yang telah meberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
3. Bapak Badrudin Kurniawan., S.AP., M.AP Selaku dosen pembimbing
4. Ibu Dr. Tjitjik Rahayu, M.Si dan Ibu Dr. Suci Megawati,S.IP., M,Si Selaku dosen penguji
5. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara Unesa
6. Ibu Yunia, Ibu Selvy beserta jajaran di Bidang SDM dan Pembiayaan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro selaku narasumber
7. Pak Afandi, Pak Budi beserta keluarga petani di Desa Beji
8. Al-Qur'an Surah 'Abasa ayat 15 sebagai pengingat
9. Seluruh pihak yang turut membantu

DAFTAR PUSTAKA

- Arief ,S., Susilo,A. (2019). Faktor-Faktor Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Wilayah Keresidenan Madiun. *Jurnal ekonomi syariah*. Vol 4, No 2. (202-213)
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro,2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro 2018-2023.
- Dewi, P.A.T., Sadjiarto, A. (2021). Pelaksanaan Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19.*Jurnal Basicedu*. Vol 5, No 4. (1909-1917).
- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.2020. Pemerintah Tetapkan Luas Lahan Baku Sawah 7,4 juta hektare.
<https://pertarung.kulonprogokab.go.id/detil/542/pemerintah-tetapkan-luas-lahan-baku-sawah-74-juta-hektare>. Di akses pada 14 September 2021.
- Hayati,M., Elfiana.,Martina. (2017). Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. *Jurnal S Pertanian*. Vol 1, No 3. (213-222)
- Ikhsani Ismania, I., Tasya Eka, F., Inati, UI., Sihidi Taqwa, I., Roziqin, A., Romadhon, A. (2020). Arah Kebijakan Sektor Pertanian di Indonesia Untuk Menghadapi Era Revolusi 4.0. *Jurnal administrasi dan kebijakan publik*. Vol 5, No 2. (134-154)
- Kementrian Pertanian Republik indonesia tahun 2019 tentang luas lahan baku sawah di Indonesia.
- Keumala,C. M., & Zamzami Zainuddin. (2018). Indikator Kesejahteraan Petani Melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pembiayaan Syariah Sebagai Solusi. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 9,No 1. (129-149)
- Nurhidayat, S C E.,Sundari,S ., Rudiyanto,B . (2022). Status Keberlanjutan Usaha Tani Pada Organik

- di Kabupaten Jember dan Bondowoso. *Jurnal Agrinika*. Vol 6, No 1. (87-89)
- Nuraisah, G., & Budi Kusumo, RA. (2019). Dampak Perubahan Iklim Terhadap Usaha Tani Padi di Desa Wanguk Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. Vol 5, No 1. (60-71).
- Nusantara, RM. (2020). Pemberdayaan Petani Melalui Penerapan Pengendalian Hama Terpadu di Jawa Timur. *Jurnal Publika UNESA*. Vol 8, No 5. <https://doi.org/10.26740/publika.v8n5.p%25p>.
- Peraturan Bupati Bojonegoro No. 48 Tahun 2018 Tentang Program Petani Mandiri.
- Peraturan Bupati Bojonegoro No. 49 tahun 2021 tentang Program Petani Mandiri.
- Putri, Lidya. 2021. Regenerasi Petani dan Rendahnya pendapatan di Sektor Pertanian. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/06/29/regenerasi-petani-dan-rendahnya-pendapatan-di-sektor-pertanian> . Di akses pada 14 September 2021.
- Ravallion, M., & Datt, G. (2002). *Why has economic growth been more propoor in some states of India than others?*. *Journal of Development Economics*, Vol 68, No 2. (381–400)
- Rahayu, S W. (2021). Pengaruh Kompetensi Penyuluh pertanian Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kartu Tani. *Jurnal Revolusi Indonesia*. Vol 1 No 12.
- Rahayu, T., Kurniawan B., Prabawati, I. (2018). *Evaluation Of partnership programs and community Development in the BPJS Healthcare Security of Surabaya Main Branch Office*. Atlantis Pres. Vol 226
- Regina, E. (2016). Tingkat Kesejahteraan Petani Rotan di Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Pendidikan Geografi*. 3, 60.
- Rose, D. C., Sutherland, W. J., Barnes, A. P., Borthwick, F., Foulkes, C., Hall, C., & Dicks, L.V. (2019). *Integrated Farm Management for Sustainable Agriculture: Lessons for Knowledge Exchange and Policy*. *Land Use Policy*, 81, 834-842. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.11.001>
- Sawir, M., Hafid, S. (2020). *Effectiveness of The Agriculture and Food Department in Developing The Food Security Sector Yalimo Regency*. *Jurnal of governance*. Vol 5, No 1. (105-122)
- Suratha, I ketut. (2017). Krisis Pertanian Berdampak Pada Ketahanan Pangan di Indonesia.
- Subagyo, Ahmad Wito. (2000). Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
- Trisna, Y.A., N Rining, E., & Tukiman. (2019). Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Usaha Pembuatan Abon Dengan Bahan Dasar Dari Jantung Pisang di Desa Dompoyong Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. *JPSI (Jurnal Of Public Sector Innovation)*. Vol 4, No 1. (38-45)
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Wahed, M. (2015). Pengaruh Luas Lahan, Produksi, Ketahanan Pangan dan Harga Gabah terhadap Kesejahteraan Petani Padi di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol 7, No 1. (68-74)
- Wahyuni, D. (2017). Penguatan Kelembagaan Petani Menuju Kesejahteraan Petani. Pusat Penelitian DPR RI. Vol 9, No 17.

